

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA 29 KABUPATEN DAN 9 KOTA DI JAWA TIMUR).

Edy Susanto dan Marhamah

Dosen Tetap STIE Semarang

Abstrak

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajat, 2004: 110 dalam Anis setyawati dan Ardi Hamzah; 2007). Pada tahun 2006 silam salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo mengalami bencana semburan lumpur yang diakibatkan Kebocoran pengeboran gas bumi tersebut dilakukan atas kelalaian Perusahaan Lapindo Brantas. Akibat semburan lumpur tersebut, kehidupan perkeonomian di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dari dokumen berupa Laporan Keuangan Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur. Dari total populasi 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, tidak ada yang dikeluarkan dari sampel, sehingga jumlah sampel 38 kabupaten dan kota selama periode pengamatan dan kemudian diuji dengan analisis regresi berganda dan menggunakan variabel kontrol (moderating).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan moderasi Belanja Daerah. sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) di moderasi dengan Belanja Daerah Di propinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajat, 2004: 110 dalam Anis setyawati dan Ardi Hamzah; 2007). Terjadinya pembangunan di suatu Negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. (Anis Setyawati dan Ardi Hamzah; 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati dan Ardi Hamzah (2007) dengan judul "Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran,, memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur. Untuk Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah. sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal yang sama dikatakan oleh Amin pujiati (2008) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Semarang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abrar (2010) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh" yang memperoleh hasil bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai dampak negatif dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penelitian ini dilakukan di salah satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi Jawa Timur yang merupakan sebuah propinsi di bagian timur pulau Jawa dengan Luas wilayah 47.922 Km². Jawa timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Pada tahun 2006 silam salah satu kabupaten di Jawa timur yaitu Kabupaten Sidoarjo mengalami bencana semburan lumpur yang diakibatkan Kebocoran pengeboran gas bumi tersebut dilakukan atas kelalaian PT. Lapindo Brantas. Dengan adanya kebocoran gas tersebut, maka mengakibatkan dampak bagi masyarakat terhadap kehidupan sosial ekonomi. Dampak lumpur Lapindo ini sangat dirasakan oleh masyarakat di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin. Hal ini terbukti sebagian wilayah yang dekat dengan semburan lumpur Lapindo seperti: Rumah, pabrik, sawah, tempat ibadah, sekolah dan lainnya yang tergolong bagian dari kehidupan sosial ekonomi menjadi lautan lumpur Lapindo (<http://i.id.wikipedia.org>). Akibat semburan lumpur tersebut, kehidupan perkeonomian di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan.

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati dan Ardi Hamzah (2007) dengan menambahkan variable Belanja Daerah sebagai variable penguatnya. Anis Setyawati dan Ardi Hamzah (2007) mengambil Obyek Kajian Di Provinsi Jawa Timur periode 2001 – 2005. Obyek penelitian ini dilakukan di Propinsi Jawa timur, dengan periode penelitian 2007 – 2010 hal ini dikarenakan tahun 2006 silam, salah satu kabupaten di Propinsi ini mengalami bencana semburan lumpur, dan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terendamnya pabrik, tempat usaha masyarakat sehingga menurunkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur pun sampai sekarang ini masih belum dapat teratasi. Selain itu, peneliti ingin membandingkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang mengambil obyek Di Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nurlan Darize, 2009). Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan asli daerah yang tinggi akan

menyebabkan perputaran uang di daerah meningkat, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati dan Ardi Hamzah (2007) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_1 = Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Muhanmad Ikhwan (2009) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Jan Waner Saragih (2006) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

H_2 = Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Menurut Hairul Aswadi (2001) dalam Anis setyawati dan Ardi Hamzah, (2007) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Friska Sihite (2009) yang memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Daerah.

Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pertumbuhan ekonomi daerah.

H₃ = Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pada praktiknya belanja dibagi ke dalam dua kelompok: belanja rutin dan pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang keluarannya tidak berupa fisik dan terjadi berulang-ulang sepanjang waktu atau periode, misalnya gaji pegawai, belanja barang/alat-alat tulis kantor, dan belanja perjalanan dinas. Belanja pembangunan adalah belanja yang menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, irigasi, dan sebagainya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY. Penelitian lain yaitu Anis Setyawati dan Ardi Harnzah (2007) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Pendapatan Daerah / Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

H₄ = Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.

Kesit Bambang Prakosa (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana alokasi umum (DAU) pengaruh terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dan DIY. Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten / kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Jan Waner Saragih (2006) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

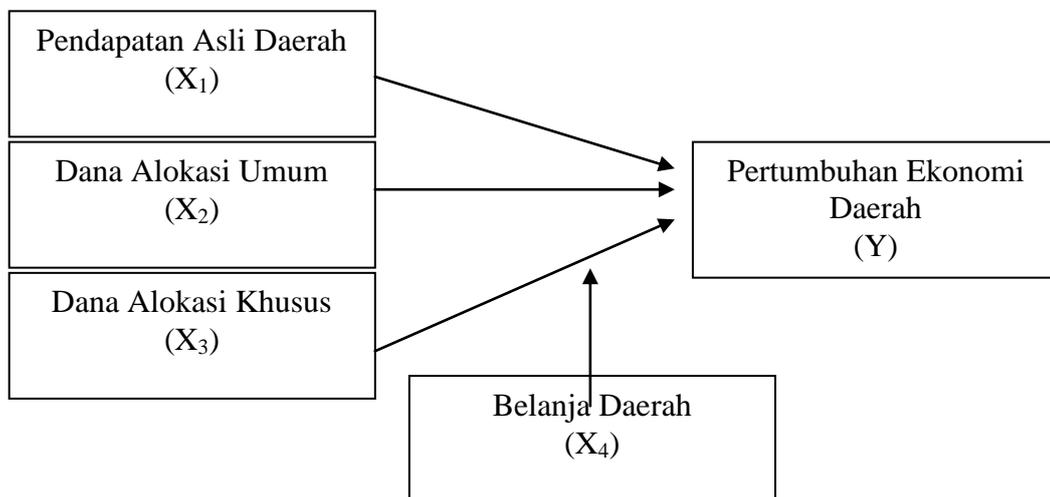
H₅ = Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan (Nurlan Darize, 2009). Jika dikaitkan, maka dengan adanya kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan meningkatkan belanja daerah untuk keperluan dari daerah tersebut. Jika belanja naik, diharapkan perekonomian daerah juga akan naik.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ = Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Definisi operasional variabel dan indikator pengukuran

Variabel	Pengertian	Alat pengukuran
Pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu	PDRB Harga Berlaku pada

	wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.	Kabupaten / kota di Jawa Timur
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah	Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten / kota di Jawa Timur
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi	Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten / kota di Jawa Timur
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan	Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten / kota di Jawa Timur
Belanja Daerah	Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	Belanja Daerah pada Kabupaten / kota di Jawa Timur

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota. Sampel yang dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan variabel penelitian. Diperoleh sampel sebanyak 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya (melalui media perantara). Sumber data penelitian ini adalah laporan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2007 – 2010 yang berupa realisasi Belanja Daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.go.id) di internet dan variabel PDRB dengan harga berlaku melalui www.bps.go.id/Jatim.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara memperhatikan dokumen berupa laporan keuangan Anggaran Belanja Daerah.

Metode Analisis

1. Uji Normalitas
2. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Autokorelasi
 - b. Uji Multikolonieritas
 - c. Uji Heteroskedastisitas
3. Analisis Deskriptif
4. *Goodnes Of Fit Model* (Uji Kelayakan Model)
 - a. Koefisien Determinasi (R^2)
 - b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)
5. Analisis Regresi

Dalam penelitian ini terdapat empat model regresi yang akan di analisis, yaitu :

- a. Model pertama adalah model pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Dengan demikian, persamaan regresi pertama dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = a + b_1PAD + b_2DAU + b_3DAK + e$$

- b. Model kedua adalah model pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah (BD) sebagai variable moderating. Dengan demikian, persamaan regresi kedua dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = a + b_1PAD + b_2BD + b_3PAD*BD + e$$

- c. Model Ketiga adalah model pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating. Dengan demikian, persamaan regresi ketiga dalam penelitian ini adalah:

$$\text{PDRB} : a + b_1\text{DAU} + b_2\text{BD} + b_3\text{DAU}*\text{BD} + e$$

- d. Model Keempat adalah model pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah (BD) sebagai variable moderating. Dengan demikian, persamaan regresi Keempat dalam penelitian ini adalah:

$$\text{PDRB} : a + b_1\text{DAK} + b_2\text{BD} + b_3\text{DAK}*\text{BD} + e$$

6. Pengujian Hipotesis / Uji Statistik t

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- a. Uji signifikansi t (uji parsial) pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.130	.623		8.228	.000
	PAD	.881	.084	.748	10.523	.000
	DAU	-.589	.122	-.350	-4.820	.000
	DAK	.185	.061	.200	3.009	.003

a. Dependent Variable: PDRB

1. Uji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 10,523 > 1.658 t tabel, dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < taraf signifikansi 5%, artinya bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB).

2. Uji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar -4,820 < 1.658 t tabel dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < taraf signifikansi 5%, artinya bahwa ada pengaruh yang negative dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB).

3. Uji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $3,009 > 1,658$ t tabel dan probabilitas sebesar $0,003 <$ taraf signifikansi 5%, artinya bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB).

b. Uji signifikansi t (uji parsial) pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.045	8.541		3.166	.002
	PAD	4.086	1.802	3.470	2.267	.025
	BD	4.649	1.672	3.180	2.781	.006
	PAD_BD	.944	.352	6.238	2.684	.008

a. Dependent Variable: PDRB

4. Uji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,684 sedangkan t table diperoleh nilai sebesar 1,658 dan nilai probabilitas sebesar $0,008 >$ taraf signifikansi 5%, artinya bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating.

c. Uji signifikansi t (uji parsial) pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.081	22.008		1.867	.064
	DAU	-6.428	3.903	-3.815	-1.647	.102
	BD	-6.574	4.388	-4.497	-1.498	.136
	DAU_BD	1.236	.777	7.437	1.590	.114

a. Dependent Variable: PDRB

5. Uji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,590 sedangkan t table diperoleh nilai sebesar 1,658 dan nilai probabilitas sebesar 0,114 > taraf signifikansi 5%, artinya bahwa ada pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating.

d. Uji signifikansi t (uji parsial) pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.513	10.172		1.623	.107
DAK	-2.530	2.293	-2.733	-1.104	.271
BD	-1.872	2.003	-1.281	-.935	.352
DAK_BD	.492	.451	3.396	1.090	.278

a. Dependent Variable: PDRB

6. Uji Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,090 sedangkan t table diperoleh nilai sebesar 1,658 dan nilai probabilitas sebesar 0,278 > taraf signifikansi 5%, artinya bahwa ada pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variable moderating.

B. Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah akan semakin pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur. Semakin meningkatnya Pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Timur, maka semakin tinggi

tarat hidup masyarakat Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dapat memaksimalkan potensi yang ada di provinsi itu sendiri, perekonomian dapat berjalan dengan maju, apabila ekonomi tumbuh dengan baik di suatu daerah, hal ini akan memacu meningkatnya infrastruktur yang baik, banyak investasi yang berkembang di Jawa Timur sehingga pendapatan per kapita masyarakat Jawa Timur naik.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur. Seharusnya dengan peningkatan DAU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Banyak dana yang masuk ke dalam provinsi Jawa Timur dengan adanya pengalokasian DAU dari pemerintah Pusat. Jika banyak dana (uang) yang masuk maka ekonomi akan lebih maju, daerah akan semakin produktif, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang negatif, yang berarti bahwa kenaikan DAU seharusnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana yang berasal dari APBN (pemerintah pusat) guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak dilakukan secara maksimal oleh daerah. Banyak dana alokasi umum yang dibelanjakan di luar provinsi Jawa Timur. Sehingga kenaikan DAU justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB)

Dari penjabaran di atas jelas, bahwa tidak semua daerah mendapatkan DAK karena DAK digunakan untuk membiayai keperluan tertentu daerah, seperti Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah, terlebih di tahun 2006 silam, di kabupaten Sidoarjo telah terjadi bencana Lumpur Lapindo yang mengakibatkan kerugian material. Diharapkan dengan adanya DAK akan meningkatkan kembali perekonomian daerah sehingga taraf hidup masyarakat meningkat. Terlebih pada Kabupaten Sidoarjo yang mengalami

kerugian cukup besar. Dengan demikian, dalam penelitian ini dikatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan pemberian DAK dari pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa timur akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Dana Alokasi Khususguna keperluan di daerah dibelanjakan di daerah Jawa Timur, dengan adanya dana tersebut maka perekonomian menjadi tumbuh di provinsi Jawa Timur. Sehingga kenaikan DAK akan menaikkan ekonomi di daerah Jawa Timur.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap PDRB didukung oleh Belanja Daerah. Jika dilihat dari pengaruh langsung, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung dengan tingginya Belanja daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Kemandirian daerah sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin tinggi sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, maka daerah tersebut akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa bantuan muatan kepentingan pemerintah pusat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Jika didukung dengan Belanja Daerah berarti pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang demikian, berarti bahwa dalam kenyataannya dana yang berasal dari daerah (PAD) digunakan oleh pemerintah daerah belanja keperluan daerah di Jawa Timur. Dengan meningkatnya PAD didukung dengan Belanja Daerah yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomidaerah. Dengan demikian, hasilmoderasi Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB), yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat propinsi Jawa Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di dukung oleh Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan proporsi DAU untuk propinsi Jawa Timur belum mampu menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) didukung dengan belanja Pemerintah daerah Jawa Timur. Jika dilihat dari arah antara DAU dengan moderasi Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan, sehingga perlu melakukan moderasi variabel lain selain Belanja Daerah, seperti variabel Tingkat Investasi, dan tenaga kerja seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Wiratno Bagus Suryono (2009) untuk memperkuat hasil pemoderasian.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada pengaruh signifikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah daerah belum mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah didukung dengan Belanja Daerah. Jika dilihat model ke empat dalam penelitian ini, hubungan langsung antara DAK, dan Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB), DAK, dan Belanja Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) diantaranya adalah Belanja Modal seperti yang dilakukan penelitian oleh Muhammad Abrar (2010), dan variabel lainnya yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah seperti Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) seperti penelitian yang dilakukan oleh Joko Waluyo (2007), Teguh Dartanto dan Bambang P.S Brodjonegoro (2008). Selain itu, untuk variabel moderasinya dapat memasukkan variabel lain yang dapat memperkuat hubungan terhadap selain Belanja Daerah seperti Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Wiratno Bagus Suryono (2009).

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderating pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) didukung oleh Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) didukung oleh Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Saran

1. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membelanjakan keperluan dengan membeli barang / jasa dari produsen yang ada didalam provinsi Jawa Timur sendiri sehingga dana dari Belanja Daerah dapat meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menanrbah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin tinggi dana yang berasal dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus), maka semakin rendah tingkat kemandirian daerah.

Keterbatasan penelitian

1. Populasi dalam penelitian ini dilakukan di Jawa Timur dengan 29 Kabupaten dan 9 Kota sehingga hasil dari penelitian ini hanya dapat di generalisasi di propinsi jawa timur saja.
2. Pada penelitian ini penulis tidak memasukkan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agenda Penelitian Mendatang

Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan propinsi di indonesia, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *“Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”*. Edisi Revisi UPP AMP YKPN
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Ernpat
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Amin Pujiati. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonominya Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Hal: 61 – 70
- Anis Setyawati dan Ardi Hamzah. 2007. “Analisa PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran” *The Ist Accounting Confeence Faculty Of Economic Universitas Indonesia*
- Ardi Hamzah. 2007. “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur” *The Ist Accounting Confeence Faculty Of Economic Universitas Trunojoyo*
- Binsar H. Simanjutak. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia. *Kongres XI ikatan Akuntansi Indonesia* Jakarta 9 Desember 2010

- Daniel Kartika Adi. 2012. Pengaruh PDRB, PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah). *Tesis STIE Dharmaputra Semarang (tidak Dipublikasikan).*
- Darwanto, Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Urnum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.*
- David Harianto dan Priyo Hari Adi. 2007. “Hubungan Dana Alokasi Umurn (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Per Kapita” *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*
- Didit Welly Udjiyanto. 2005. “Kemarnpuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Periode 1998 - 2002). *Ekonomi Bisnis Vol.6 No.1 Januari 2005: 59-66*
- DjadjatSudradjat. 2001.*Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Daerah dalam Mendukung Terbentuknya Clean Government. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN.*
- Friska Sihite. 2009. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara. *Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utaratidak dipublikasikan.*
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Edisi ketiga. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Jan Waner Saragih. 2006. pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun. *Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utaratidak dipublikasikan.*
- Joko Waluyo. 2007. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia”. *Pararel Session IA: fiscal decentrs lization 12 Desember 2007*
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umurn (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap hediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)”. *JAAI Vol 8 No. 2, Desember Tahun 2004.*
- Lili Masli. 2008. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketirnpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Prordnsi Jawa Barat”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia.*

- Muhammad Abrar. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 9 No.1 April 2010: 79-88
- Muhammad Ikhwan. 2009. "Analisis factor-faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Besar Provinsi Jawa Tengah periode 2004 – 2008". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*.
- Mutiara Maimunah. 2006. "Flypapaer Effect Pada Dana Alokasi Umurn (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera" *Simposium Nasional Akuntansi IX* Padang.
- Mardiasrno. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nurlan Darize. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. Indeks Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* Yogyakarta: BPFE
- Priyo Hari Adi. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX* Padang
- Sony Yuwono. 2005. Penganggaran sektor publik. Bayu Media malang
- Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelition Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Teguh Dartanto dan Bambang P.S. Brodjonegoro (2008) "Dampak Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan" *Jurnal Eknomi Dan Pembangunan Indonesia*.
- Van, Hagen. 2005. *Political Economi of Fiscal Institutions, Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESSY*.
- Wiratno Bagus Suryono. 2009. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah" *Jurnal Pengembangan Ekanami Dan Pembangunan Indonesia*
- _____Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____Undang-Undang Republik Lndonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- _____Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara

_____ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

<http://id.wikipedia.org>

www.djpk.depkeu.go.id.

www.bps.go.id/Jateng